BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat, dalam kajian administrasi publik, kerap dimaknai sebagai upaya strategis untuk membekali warga dengan kemampuan mengelola sumber daya di sekitarnya secara mandiri dan berkesinambungan. Melalui proses tersebut, posisi masyarakat tidak lagi sebatas penerima kebijakan, melainkan berubah menjadi pihak yang aktif mengidentifikasi persoalan, merumuskan kebutuhan, sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang ada secara kolektif. Salah satu persoalan yang relevan dianalisis melalui perspektif tersebut adalah pengelolaan sampah, khususnya di kawasan perkotaan yang padat penduduk dengan keterbatasan ruang dan kebutuhan pengelolaan lingkungan belum tersedia secara merata.

Persoalan sampah di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang membutuhkan perhatian. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), sebagai bagian dari upaya mewujudkan target Indonesia Bebas Sampah pada 2029. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang diungkap dalam forum tersebut mencatat bahwa timbulan sampah di Indonesia pada 2023 menyentuh angka 56,63 juta ton, sementara pengelolaan secara layak baru menjangkau 39,01 persen atau setara 22,09 juta ton. Sisanya sebagian besar berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) melalui sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) yang jauh dari standar

pengelolaan modern. Ditambah lagi, ratusan unit TPA di berbagai daerah sudah melampaui kapasitas tampungnya, kondisi yang menegaskan bahwa penanganan sampah, tak terkecuali yang berasal dari rumah tangga sebagai penyumbang timbulan terbesar, sudah tidak bisa ditunda lagi (Kementerian Lingkungan Hidup, 2025).

Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya berkaitan dengan penanganan sampah setelah dihasilkan, tetapi juga mencakup upaya pengurangan sampah dan penanganan sejak dari sumbernya. Pengelolaan tersebut membutuhkan peran pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar pengurangan dan penanganan sampah dapat dilakukan secara terpadu. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya mengandalkan penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola sampah dari lingkungan tempat tinggalnya.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti pemilahan sampah dari sumber, bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta edukasi lingkungan. Bank sampah menjadi strategi yang paling umum diterapkan karena bekerja sebagai mekanisme pengumpulan dan pemilahan kolektif oleh warga, yang tidak hanya mengurangi volume sampah tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi dan lingkungan (Donna et al., 2016). Melalui program ini, posisi warga bergeser dari

penerima layanan yang pasif menjadi pelaku yang menggerakkan asetnya sendiri untuk menuntaskan persoalan lingkungan.

Kondisi tersebut dapat dilihat di Kampung Edukasi Sampah RT 23 RW 07, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang berada di lingkungan Perumahan Pesona Sekar Gading dengan penduduk berlatar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam. Sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan permukiman padat sehingga lahan terbuka yang tersedia relatif terbatas. Pengelolaan sampah di kawasan ini dimulai pada tahun 2016 atas inisiatif Ketua RT 23 RW 07 saat itu, Edi Priyanto, sebagai respons terhadap meningkatnya persoalan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar. Pada tahap awal, sebagian warga masih menganggap pemilahan sampah organik, nonorganik, dan bahan berbahaya beracun (B3) sebagai kegiatan yang merepotkan, sehingga pengurus RT bersama warga melakukan edukasi bertahap melalui pertemuan PKK, arisan, dan kerja bakti.

Program lingkungan yang dijalankan secara bertahap sejak 2016, mulai dari pengelolaan sampah rumah tangga hingga penghijauan, perlahan membentuk budaya peduli lingkungan di RT 23 RW 07. Upaya tersebut memperoleh perhatian pemerintah setelah kawasan ini meraih Juara I Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan tingkat Kecamatan Sidoarjo, yang kemudian mengantarkan RT 23 RW 07 mewakili Kecamatan Sidoarjo dalam ajang Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) *Zero Waste* oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Melalui ajang tersebut, kawasan ini meraih penghargaan sebagai kampung dengan inovasi pengelolaan lingkungan (DLHK Kabupaten Sidoarjo, 2018). Pencapaian ini

menjadi awal berkembangnya kawasan tersebut menjadi Kampung Edukasi Sampah yang dikenal luas.

Kampung Edukasi Sampah dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi aset lokal dan praktik pemberdayaan yang relevan dengan pendekatan *Asset Based Community Development*. Potensi tersebut terlihat dari keaktifan warga dalam pengelolaan sampah serta kemandirian dalam memanfaatkan sumber daya lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut memiliki beragam aset komunitas yang dapat dikembangkan melalui pendekatan ABCD.

Warga terlibat secara sukarela dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan memperbanyak tanaman di sekitar tempat tinggal mereka. Aktivitas semacam ini mendorong perubahan persepsi masyarakat mengenai sampah, yang semula dianggap sebagai barang tak berguna, kini mulai dipandang sebagai bahan yang masih bisa diolah dan memiliki nilai guna. Keikutsertaan warga ini menunjukkan tumbuhnya kepedulian bersama untuk merawat alam sekitar secara berkesinambungan, sekaligus menjadi wujud nyata pemberdayaan yang berlandaskan pada partisipasi sosial (Agusti & Wibawani, 2023; Ningsih, 2023).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Edukasi Sampah juga melibatkan kelompok masyarakat seperti PKK RT 23 dan Bank Sampah "Telulikur" yang masih aktif hingga kini. Keterlibatan kedua kelompok ini menunjukkan adanya partisipasi sosial warga dalam pengelolaan lingkungan, khususnya sampah. Kerja sama antarwarga melalui kelompok tersebut juga turut menjaga keberlanjutan program lingkungan di kawasan ini.

Sejak resmi dikenal sebagai Kampung Edukasi Sampah, program yang dikembangkan tidak lagi terbatas pada pengelolaan sampah, tetapi meluas ke berbagai kegiatan pemberdayaan lingkungan yang saling terhubung. Warga mengembangkan budi daya tanaman hidroponik dan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) yang disiram menggunakan air hasil olahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sebagai bentuk pemanfaatan lanjutan dari pupuk kompos dan sumur resapan yang telah dibangun. Kawasan ini juga membangun instalasi pembangkit listrik berupa panel surya (*solar cell*) yang digunakan untuk menggerakkan pompa hidroponik dan menyuplai lampu ultraviolet, sekaligus menjadi sarana edukasi pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan (Kampung Edukasi Sampah, 2026). Keberadaan berbagai fasilitas tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah di Kampung Edukasi Sampah berkembang menjadi ekosistem pemberdayaan yang saling terhubung.

Kampung Edukasi Sampah ini juga dikenal luas karena adanya kegiatan edukasi lingkungan bagi masyarakat dari luar wilayah seperti kunjungan edukasi dan *study tour* dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, hingga berbagai instansi yang ingin mempelajari praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara langsung. Kegiatan tersebut menjadikan Kampung Edukasi Sampah sebagai sumber pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas, sekaligus memperkuat peran kawasan ini sebagai kampung percontohan di Kabupaten Sidoarjo.

Di Kampung Edukasi Sampah, warga juga melakukan pemilahan sampah menjadi tiga kategori, yaitu organik, nonorganik, dan bahan berbahaya beracun

(B3). Sampah organik diolah menjadi kompos, sementara sampah kering dikelola melalui Bank Sampah Telulikur, sampah bernilai ekonomi disetorkan ke bank sampah, sebagian lainnya diolah menjadi produk kerajinan, seperti terlihat pada Gambar 1.1. Praktik ini menunjukkan bahwa sampah tidak lagi dipandang sebagai material yang harus dibuang, melainkan sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.



Gambar 1. 1 Aktivitas Bank Sampah Telulikur, Warga Menyetor dan Menimbang Sampah Kering.

Sumber : instagram @kampungedukasisampah yang diolah peneliti, 2026.

Pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi kompos, pupuk organik cair, dan eco enzyme juga menjadi bagian dari kegiatan pengelolaan lingkungan di Kampung Edukasi Sampah (Chandra et al., 2022). Pada tahun 2025, pengolahan sampah organik tersebut dikembangkan melalui pemanfaatan sumur resapan multifungsi, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2. Pemanfaatan tersebut menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mengolah sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali sekaligus mengurangi sampah yang harus dibuang. (Ardliyanto, 2025).



Gambar 1. 2 Warga memanen kompos hasil pengolahan sampah organik dari sumur resapan di Kampung Edukasi Sampah.

Sumber : instagram @kampungedukasisampah yang diolah peneliti, 2026

Keberlangsungan berbagai program di Kampung Edukasi Sampah juga didukung oleh sumber pendanaan yang beragam dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Selain dana swadaya dari tradisi jimpitan, pendanaan juga diperoleh dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*/CSR) melalui pengajuan proposal kebutuhan, serta kontribusi sukarela dari hasil kegiatan kunjungan dan edukasi. Sebagian pendanaan sebelumnya juga berasal dari hadiah berbagai perlombaan lingkungan yang pernah diikuti, namun saat ini warga memilih tidak lagi mengikuti perlombaan tersebut agar kawasan lain memperoleh kesempatan yang sama, sementara Kampung Edukasi Sampah tetap menjalankan perannya sebagai tempat belajar bagi kampung lain. Kondisi tersebut menunjukkan adanya sumber daya finansial yang dikelola masyarakat untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pengelolaan lingkungan.

Selain mengenai pengelolaan dan pendanaan, keterbatasan ruang fisik menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Kepadatan permukiman dengan gang yang sempit menyebabkan ruang untuk pengelolaan, pemilahan, dan penyimpanan sementara sampah menjadi terbatas. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3, gang di RT 23 RW 07 menjadi koridor utama aktivitas warga sekaligus ruang terbuka yang tersedia di lingkungan tersebut. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada.



Gambar 1. 3 Kondisi permukiman padat di Kampung Edukasi Sampah RT 23 RW 07 Kelurahan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi tantangan sekaligus ruang lingkup pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sumber : dokumentasi yang diolah peneliti, 2026

Meskipun berbagai kegiatan telah berjalan, partisipasi masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah cenderung menurun seiring waktu akibat kesibukan sehari-hari. Sebagian warga juga masih kesulitan menguasai aspek teknis pengolahan sampah organik, seperti pengomposan dan pembuatan *eco enzyme* yang

membutuhkan ketelitian dan konsistensi. Konsistensi partisipasi masyarakat, selain ketersediaan sarana, terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan program bank sampah.

Praktik pengelolaan sampah di Kampung Edukasi Sampah menunjukkan keberadaan berbagai aset masyarakat yang saling berkaitan. Aset manusia terlihat dari pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah. Aset sosial terlihat dari hubungan sosial, kerja sama, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Aset fisik terlihat dari keberadaan bank sampah, fasilitas pengolahan sampah, sumur resapan, IPAL, hidroponik, dan fasilitas pendukung lainnya. Aset alam terlihat dari pemanfaatan lingkungan dan sumber daya yang tersedia di kawasan permukiman. Sementara itu, aset finansial terlihat dari kegiatan jimpitan, hasil pengelolaan sampah, bantuan CSR, serta sumber pendanaan lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan.

Kombinasi antara keterbatasan ruang fisik, menurunnya partisipasi masyarakat, dan kendala teknis menunjukkan bahwa keberadaan berbagai aset tersebut belum secara otomatis membuat pengelolaan sampah berjalan secara maksimal. Persoalannya tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya aset, tetapi juga pada bagaimana masyarakat mengenali, memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan aset yang telah dimiliki. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendekatan pemberdayaan yang melihat masyarakat bukan berdasarkan kekurangan yang dimiliki, tetapi berdasarkan potensi dan aset yang tersedia sebagai dasar dalam mengembangkan kegiatan.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks tersebut adalah *Asset Based Community Development* (ABCD). Berbeda dengan pendekatan konvensional yang berfokus pada kekurangan, ABCD menjadikan aset dan kekuatan masyarakat sebagai titik awal pembangunan komunitas. Masyarakat dipandang sebagai komunitas yang memiliki aset yang dapat diidentifikasi dan digerakkan untuk mendukung pencapaian tujuan bersama. Aset tersebut meliputi aset manusia (*human capital*), aset sosial (*social capital*), aset fisik (*physical capital*), aset alam (*natural capital*), dan aset finansial (*financial capital*).

Pendekatan ABCD dinilai tepat diterapkan di Kampung Edukasi Sampah karena masyarakat telah memiliki berbagai aset yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Aset manusia terlihat dari pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah serta kemampuan masyarakat untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan. Aset sosial terlihat dari hubungan dan kerja sama antarwarga. Aset fisik terlihat dari keberadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Aset alam terlihat dari pemanfaatan lingkungan dan hasil pengolahan sampah organik. Sementara itu, aset finansial terlihat dari dana jimpitan, hasil pengelolaan sampah, bantuan CSR, serta sumber pendanaan lainnya. Melalui pendekatan ABCD, berbagai aset tersebut dapat dianalisis berdasarkan keberadaan, pemanfaatan, serta keterlibatannya dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah.

Berbagai penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah (Humardhiana et

al., 2023). Penelitian tersebut dilakukan di Desa Klangenan, Kabupaten Cirebon, melalui kegiatan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga menjadi eco enzyme dengan memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengolah sampah serta mulai tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam konteks wilayah desa dengan karakteristik dan kondisi lingkungan yang berbeda dengan Kampung Edukasi Sampah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada kawasan permukiman perkotaan di wilayah kelurahan dengan keterbatasan ruang fisik, sehingga pemanfaatan aset masyarakat dalam pengelolaan sampah memiliki kondisi yang berbeda. Selain perbedaan lokasi, penelitian ini juga memandang pengelolaan sampah melalui keterkaitan lima aset masyarakat, yaitu aset manusia, sosial, fisik, alam, dan finansial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat penerapan pendekatan berbasis aset dalam pengelolaan sampah, tetapi juga mengkaji bagaimana berbagai aset tersebut dimanfaatkan dan saling berkaitan dalam mendukung keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis Asset Based Community Development (ABCD) dalam pengelolaan sampah di Kampung Edukasi Sampah Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana aset yang dimiliki masyarakat, meliputi aset manusia, sosial, fisik, alam, dan finansial, dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah di

lingkungan permukiman. Selain itu, penelitian ini juga melihat keterlibatan masyarakat serta hubungan antar-aset dalam mendukung keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah. Melalui pendekatan ABCD, penelitian ini menganalisis bagaimana kekuatan dan sumber daya yang telah dimiliki masyarakat dapat dioptimalkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah penelitian tersebut, rumusan masalah yang akan dijawab oleh peneliti adalah ”bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset Based Community Development* diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kampung Edukasi Sampah Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset Based Community Development* dalam pengelolaan sampah di Kampung Edukasi Sampah Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya

mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis *Asset Based Community Development* dalam pengelolaan sampah di kawasan perkotaan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi aset lokal.

   b. Bagi Kelurahan Sekardangan

      Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelaksanaan program pengelolaan sampah di tingkat kelurahan, sekaligus menjadi rujukan untuk mendorong partisipasi warga dan menjaga keberlangsungan program bank sampah sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan di Kelurahan Sekardangan.

   c. Bagi Kampung Edukasi Sampah

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset lokal untuk meningkatkan keberlanjutan program pengelolaan sampah.

   d. Bagi Masyarakat Kabupaten Sidoarjo

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan aset lokal dalam mendukung pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan.

e. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi, bahan pembelajaran, serta perbandingan bagi akademisi maupun mahasiswa yang meneliti isu serupa di bidang administrasi publik, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD dan pengelolaan sampah